

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PATROLI PRESISI DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN LINGKUNGAN

Kaifa Rizki¹⁾, Fista Hastamma²⁾, Markus Jonathan³⁾, Tafriz Putri Maulida⁴⁾,
Icellin Cindi Audina⁵⁾, Lusi Tania Pirade⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6)}Politeknik STIA LAN Jakarta
³markussjonathann@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Precision Patrol policy by the Indonesian National Police, particularly the Regional Police (Polda), in enhancing environmental security. Precision Patrol is a preventive strategy that utilizes technology, intelligence data, and community involvement to maintain public order and reduce crime rates. Using a qualitative approach through literature review, this research explores the effectiveness of patrols in identifying high-crime areas, improving rapid police response, and strengthening public trust in law enforcement institutions. The findings indicate that the implementation of Precision Patrol not only enhances the public's sense of safety and comfort but also fosters greater citizen participation in incident reporting and neighborhood surveillance. The integrated application of preemptive, preventive, and repressive strategies significantly contributes to the creation of a more secure and orderly environment. This study recommends increasing patrol frequency and optimizing collaboration between the community and law enforcement to ensure sustainable public safety.

Keywords : Precision Patrol, Environmental Security, Public Policy, Community Participation, Preventive Strategy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Patroli Presisi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah (Polda), dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Patroli Presisi merupakan strategi preventif yang memanfaatkan teknologi, data intelijen, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan menekan angka kriminalitas. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas patroli dalam mendeteksi wilayah rawan kejahatan, meningkatkan respon cepat aparat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Patroli Presisi tidak hanya meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat, tetapi juga memperkuat partisipasi warga dalam pelaporan dan pengawasan lingkungan. Strategi preemptif, preventif, dan represif yang dijalankan secara terpadu berkontribusi signifikan terhadap terciptanya lingkungan yang lebih kondusif. Penelitian ini menyarankan peningkatan frekuensi patroli dan optimalisasi kolaborasi antara masyarakat dan aparat demi keberlanjutan keamanan lingkungan.

Kata Kunci : Patroli Presisi, Keamanan Lingkungan, Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Strategi Preventif

LATAR BELAKANG

Tindak kejahatan serta penyimpangan terhadap norma-norma sosial yang berlaku umum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak masa lampau. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyatakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang termasuk unsur utama dalam hukum pidana (Anugrah, Wisnu, & Perkasa, 2023). Di sisi lain, Dr. David Scott, seorang dosen senior Kriminologi di Universitas Terbuka Inggris, menekankan bahwa konsep kejahatan memiliki sifat yang rumit dan kontroversial, sehingga belum terdapat definisi tunggal yang diterima secara universal. Meski demikian, pendekatan legalistik sering digunakan

sebagai cara paling sederhana, yaitu mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang melanggar hukum, terutama hukum pidana. Pendekatan ini mencakup unsur-unsur seperti kesalahan pidana dan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, suatu tindakan dikatakan sebagai kejahatan apabila melanggar norma hukum dan dikenai sanksi pidana seperti hukuman penjara atau denda (OpenLearn, 2019). Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, diperlukan sistem hukum yang mampu menegakkan aturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggar. Keberadaan sistem hukum yang efektif dan efisien sangat penting dalam menurunkan angka kejahatan serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Guna menjaga ketertiban dan keamanan, negara membentuk institusi kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sendiri dibentuk pada 1 Juli 1946. Sejak awal kemerdekaan, Polri telah merumuskan berbagai kebijakan serta menjalin kerja sama kelembagaan dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, Polri memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat tiga tugas pokok kepolisian, yaitu:

- a. Tugas pembinaan masyarakat, yang dilaksanakan melalui pendekatan sosial dan prinsip mutualisme guna meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
- b. Tugas preventif, yang mencakup upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan perlindungan, pengayoman, serta bantuan kepada masyarakat guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.
- c. Tugas represif justisil, yaitu tindakan penegakan hukum yang melibatkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Salah satu tugas kepolisian yang dinilai paling efektif dalam menangani serta mengungkap tindak pidana adalah tindakan preventif atau pencegahan kejahatan (Utama, 2019). Salah satu wujud nyata dari upaya preventif tersebut adalah kegiatan patroli. Patroli dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya interaksi antara niat dan kesempatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun pelanggaran hukum. Selain itu, patroli juga berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban hukum serta menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat, sehingga tercipta kondisi yang kondusif dan tertib. Hal ini selaras dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, organisasi ini dikenal dengan nama Markas Besar Kepolisian (Mabes Polri). Sementara itu, di tingkat daerah, struktur Polri terbagi menjadi tiga jenjang, yaitu Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek). Dalam upaya menjalankan fungsi kepolisian secara optimal, salah satu wilayah kerja kepolisian yaitu Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menginisiasi sebuah program inovatif di bidang pencegahan tindak kejahatan, yakni program Patroli Perintis Presisi yang secara resmi diluncurkan pada 13 Januari 2022.

Tim Patroli Perintis Presisi memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan tindak kriminal di wilayah Jakarta. Menurut laporan Tribbratanews (2023), Kapolda Metro Jaya periode 2020–2023, Irjen. Pol. Fadil Imran, menjelaskan bahwa pembentukan program ini bertujuan untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal berbagai bentuk kejahatan. Program ini melibatkan sekitar 300 personel yang tergabung dalam tim Patroli Perintis Presisi. Berdasarkan data tahun 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa 79% dari seluruh tindak kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan konvensional, dan sekitar 35% di antaranya termasuk dalam kategori kejahatan jalanan (Aprilia, 2022). Pembentukan Tim Patroli Perintis oleh Polda Metro Jaya juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan meningkatnya rasa aman, khususnya di malam hari. Fokus utama dari program ini adalah mengantisipasi berbagai potensi gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), seperti tawuran, penyalahgunaan narkotika, konsumsi minuman keras di tempat umum, aksi begal, balap liar, serta aktivitas kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat.

Polda Metro Jaya telah membentuk Tim Patroli Perintis Presisi yang disebar di seluruh jajaran Kepolisian Resort (Polres) di wilayah hukumnya. Setiap Polres dan Polsek bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kondisi Kamtibmas. Dalam konteks ini, kehadiran Patroli Perintis Presisi menjadi langkah strategis dalam mencegah berbagai bentuk tindak kriminal, terutama yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tertentu. Kegiatan patroli ini dilaksanakan dengan pendekatan berbasis teknologi dan analisis data, sehingga mampu mengidentifikasi titik-titik rawan kejahatan secara lebih akurat dan efisien.

TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan patroli presisi dalam upaya menjaga dan meningkatkan keamanan lingkungan, mengidentifikasi strategi, metode, dan pola pelaksanaan patroli presisi yang diterapkan di wilayah hukum kepolisian. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui dampak dari kebijakan patroli presisi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan setempat. Peneliti juga berupaya menggali peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan patroli presisi di tingkat lokal, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaan patroli presisi di wilayah tersebut.

TINJAUAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah program yang dibuat oleh institusi atau organisasi publik untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam pembuatannya, kebijakan ini memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penghambat agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan (Yurensi Laary et al., 2022). Menurut Carl I. Friedrick, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan mempertimbangkan adanya peluang dan ancaman yang mungkin muncul. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu dalam suatu negara dan dijalankan oleh masyarakat baik secara sukarela maupun adanya unsur

paksaan (Wahyu Trisno Aji & Mohammad Solekhan, 2024).

Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik memiliki empat tujuan utama (dalam Wahyu Trisno Aji & Mohammad Solekhan, 2024):

1. Sebagai Alat Pengatur: Kebijakan publik dibuat untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar hidup lebih tertib dan teratur.
2. Menjaga Stabilitas Negara: Kebijakan berperan menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan agama demi keamanan dan kelancaran negara.
3. Distribusi Sumber Daya Nasional: Kebijakan mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara optimal untuk kepentingan nasional.
4. Memperkuat Pasar dan Negara: Kebijakan memperkuat pasar dan peran negara dalam menjaga kedaulatan serta keamanan untuk kesejahteraan bersama.

Patroli Perintis

Tim Patroli Perintis Presisi adalah unit Polri yang bertugas melakukan patroli untuk mencegah kejahatan dan menjalin komunikasi dengan masyarakat. Awalnya bertugas di Polda Metro Jaya, kemudian tim ini ditugaskan di berbagai polda sejak Juni 2023 guna mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban bersama (Ananda Ridho Sulisty, 2024). Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi kepolisian selalu memiliki dasar hukum yang menjadi acuan operasional. Dalam hal ini, pelaksanaan patroli oleh Tim Patroli Perintis Presisi mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan resmi, yaitu Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Pada pasal 22 memuat pedoman teknis mengenai pelaksanaan patroli bermotor roda dua yang mencakup prosedur, perlengkapan, serta standar keselamatan yang harus dipenuhi oleh petugas di lapangan (Bondan Anugrah et al., 2023). Patroli ini dilaksanakan oleh Unit Sabhara (Samapta Bhayangkara) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Keaktifan tim patroli presisi membuat masyarakat merasa lebih aman dan terjaga. Dengan melaksanakan patroli, aparat kepolisian dapat menjalin hubungan kemitraan yang positif dengan masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Melalui kegiatan ini, polisi bisa memperoleh informasi dari warga terkait potensi gangguan keamanan, menerima laporan peristiwa penting, serta berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman (Karana et al., 2024).

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang stabil. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Meningkatkan Legitimasi : Melibatkan masyarakat membuat kebijakan lebih dapat diterima karena disusun bersama pihak yang berdampak langsung.
2. Memberikan Wawasan Lokal : Masyarakat memahami kondisi lapangan secara langsung, sehingga saran dari mereka menjadi pertimbangan agar kebijakan lebih tepat sasaran.
3. Mendorong Akuntabilitas :Partisipasi masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan kebijakan.

Model kebijakan pemolisian masyarakat yang dijalankan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya dalam mencegah tawuran menekankan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kemitraan dengan warga. Pendekatan ini meliputi komunikasi serta koordinasi yang solid, kolaborasi dengan berbagai elemen, penanganan yang bersifat edukatif dan pemulihan, serta evaluasi kinerja secara terus-menerus (Santo, 2024). Konsep pemolisian masyarakat (Polmas) bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dan kepatuhan warga terhadap aturan yang berlaku agar tercipta kamtibmas yang kuat, kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan Polmas perlu terus ditingkatkan (Saputra et al., n.d.). Dalam teori administrasi pembangunan, Sherry R. Arnstein, memperkenalkan konsep *ladder of participation* atau tangga partisipasi untuk menggambarkan tingkat keterlibatan warga dalam proses kebijakan. Konsep ini dibagi menjadi tiga tingkatan utama yang terdiri dari delapan anak tangga partisipasi. Tingkatan terendah adalah *non-participation* (manipulasi dan terapi), di mana partisipasi bersifat semu dan hanya untuk kepentingan penguasa. Tingkatan kedua adalah *tokenism* (pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman) yang melibatkan dialog dengan publik tetapi tanpa kekuasaan nyata dalam pengambilan keputusan. Tingkatan tertinggi adalah *citizen power*, di mana warga memiliki kendali nyata dan turut menentukan arah kebijakan, menandai adanya pergeseran kekuasaan dari pemerintah ke masyarakat (Mardiyanta, n.d.).

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002, Kamtibmas adalah kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai syarat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Kondisi ini ditandai dengan tegaknya hukum, terciptanya ketentraman, serta kemampuan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi gangguan atau pelanggaran hukum (H. Burhanuddin, 2017). Masyarakat mempunyai potensi yang dapat diangkat menjadi kekuatan yang baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk mencegah atau menangkal gangguan kamtibmas khususnya kejahatan (Yulianti T et al., n.d.).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi literatur, untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Patroli Presisi dalam upaya peningkatan keamanan lingkungan serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Pendekatan penelitian merupakan strategi yang disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara sistematis. Studi literatur sendiri merupakan ringkasan mendalam dari berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai tertentu, yang bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pemahaman telah dicapai serta celah yang masih perlu dieksplorasi. Bogdan dan Taylor (1975:5) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah pendekatan riset yang menghasilkan data dalam bentuk narasi atau deskripsi tertulis yang berasal dari ucapan maupun perilaku nyata subjek yang diamati.

Informasi dalam studi literatur bisa diperoleh dari beragam sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, internet, dan referensi pustaka lainnya. Menurut Zes (2008 dalam Nursalam, 2016), metode ini mencakup proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, hingga penyusunan bahan penelitian. Dengan menerapkan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Patroli Presisi serta dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekitar.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai urutan untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang perlu diteliti secara objektif (Hardani et al., 2022). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dari kajian literatur atau studi pustaka. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa sumber relevan yaitu meliputi :

- a. Identifikasi Sumber, pada tahap ini peneliti menentukan sumber literatur yang relevan seperti artikel, jurnal, dan berita mengenai Patroli Presisi.
- b. Pengumpulan Data, pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan mencatat informasi yang dianggap penting untuk mendukung penelitian dari berbagai sumber-sumber yang telah diidentifikasi.
- c. Mendeskripsikan data, pada tahap ini peneliti memberikan gambaran atau penjelasan mengenai data yang telah dikumpulkan
- d. Menyimpulkan data, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan atau interpretasi dari data yang telah dikumpulkan

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, dan dokumentasi.

Bogdan dan Biklen (1982) mengemukakan bahwa analisis data merupakan proses bekerja dengan data secara sistematis, termasuk mengaturnya, mengelompokkan ke dalam bagian-bagian yang mudah dianalisis, menyatukannya kembali, mengenali pola-pola tertentu, mengidentifikasi informasi yang penting serta pelajaran yang dapat dipetik, hingga menyusun narasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring, memilih, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar menjadi lebih fokus dan mudah dipahami. Dalam tahap ini, peneliti mengelompokkan data yang penting, membuang data yang tidak relevan, serta menyusun informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir dan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, seperti dalam bentuk narasi dan tabel. Tujuannya adalah agar peneliti dapat melihat pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu yang muncul dari data, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses analisis data kualitatif, di mana peneliti memberikan makna atau interpretasi terhadap data yang sebelumnya telah disaring dan disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Patroli Presisi dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan

Implementasi kebijakan *Patroli Presisi* merupakan salah satu bentuk inovasi dalam sistem keamanan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi, data intelijen, dan strategi responsif untuk menekan potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis serta kajian literatur, peran Patroli Presisi dapat dilihat dari beberapa aspek utama yang saling berkaitan, yaitu: pencegahan, kehadiran simbolik, respons cepat, dan keterlibatan masyarakat.

Pertama, dari aspek pencegahan, Patroli Presisi secara efektif mampu memetakan potensi kerawanan melalui analisis data berbasis wilayah. Penggunaan teknologi informasi dan pemetaan digital memungkinkan petugas untuk mengetahui titik-titik rawan kejahatan secara lebih akurat. Hal ini berdampak langsung pada penyusunan rute patroli yang lebih strategis dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya rutinitas semata. Dengan demikian, potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi lebih dini melalui kehadiran preventif.

Kedua, peran kehadiran simbolik anggota kepolisian di lingkungan masyarakat melalui patroli rutin menunjukkan komitmen negara dalam menjamin rasa aman bagi warga. Kehadiran ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga sebagai simbol kontrol sosial yang dapat menurunkan niat pelaku kejahatan. Berdasarkan analisis yang diperoleh dari publikasi resmi menunjukkan bahwa intensitas kehadiran petugas di area publik melalui Patroli Presisi berkontribusi pada menurunnya angka kejahatan konvensional, seperti pencurian, perkelahian antarpemuda, dan tindakan kejahatan lainnya.

Ketiga, dari segi respons cepat, Patroli Presisi dirancang agar unit-unit patroli dapat bergerak secara mobile dengan koordinasi terpadu melalui sistem komando terintegrasi. Informasi yang masuk dari masyarakat atau sistem pelaporan digital dapat segera ditindaklanjuti karena keberadaan unit patroli yang telah disebar di wilayah strategis. Kecepatan ini penting dalam menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Keempat, terdapat peran penting dalam keterlibatan masyarakat (community engagement). Meskipun tidak menggunakan data wawancara langsung, kajian dari dokumen kebijakan dan laporan kegiatan menunjukkan bahwa Patroli Presisi mengedepankan prinsip partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam pelaporan insiden, pengawasan lingkungan, dan penyusunan prioritas pengamanan wilayah. Ini menciptakan sinergi antara aparat dan warga dalam membangun ekosistem keamanan yang berkelanjutan.

2. Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mencerminkan keterlibatan aktif warga negara yang perlu ditingkatkan dalam mengatasi persoalan keamanan. Secara prinsip, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga ketertiban dan stabilitas di lingkungan sekitarnya. Peran ini penting agar tercipta rasa aman dan kenyamanan bersama. Selain itu, upaya menjaga keamanan juga merupakan bagian dari kontribusi warga dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik (Siahaan et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan keamanan lingkungan juga memerlukan dukungan dari teknologi digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan cara yang lebih efisien dalam pengawasan dan

pelaporan kejadian, seperti melalui penggunaan aplikasi pelaporan yang dapat mempercepat respons dari aparat keamanan (Mariana Cerca et al., 2022). Dengan adanya teknologi ini, masyarakat menjadi lebih mudah terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan dan menjadikannya bagian penting dari strategi keamanan modern. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Siahaan et al. (2024), teknologi informasi dan komunikasi menjadi pendukung keamanan publik melalui sistem pengawasan, pengolahan data, dan pelaporan insiden. Sebagai contoh keberhasilan dalam upaya peningkatan keamanan lingkungan melalui pengembangan aplikasi AMUR di desa Sambirejo Timur yang di mana masyarakat bisa melaporkan beberapa insiden, seperti tawuran, geng motor, pencurian, dan lain- lain. Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Wahab Firmansyah (2024), pada November 2024, Tim Patroli Perintis Presisi yang dipimpin oleh Aipda Ambarita berhasil menangkap empat pelaku begal di wilayah Jatiasih, Bekasi. Hal ini karena adanya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang aktif serta ditunjang dengan kemajuan teknologi, menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang aman dan tertib.

3. Dampak Adanya Patroli Presisi terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di jalanan seperti balap liar, tawuran, geng motor, dan pencurian kendaraan, jelas mengindikasikan adanya gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban lalu lintas serta potensi ancaman fisik bagi warga. Kemudian ditambah dengan adanya laporan masyarakat mengenai peredaran narkoba, miras, dan prostitusi, menunjukkan bahwa masalah Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional, tetapi juga melibatkan isu-isu sosial yang lebih kompleks dan merusak. Hal ini mendorong para kepolisian untuk melakukan penegakan hukum yang strategis dengan melaksanakan Patroli Presisi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat, serta mencegah kejahatan jalanan pada waktu-waktu rawan yaitu malam hari. Dalam pelaksanaan Patroli Presisi ini, terdapat beberapa dampak yang terlihat dan dirasakan oleh masyarakat yaitu :

1. Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman pada Terhadap Lingkungan

Penerapan patroli pada jam rawan terbukti efektif dalam mengurangi balap liar, tawuran, geng motor, dan pencurian kendaraan serta peredaran miras. Hal ini karena adanya respon cepat dari tim patroli perintis yang melakukan pembubaran dan penangkapan pelaku kejahatan seperti contoh patroli di Desa Perampuan, kota Gorontalo, dan daerah Jakarta Timur serta Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari Bidhumas Polda Metro Jaya Patroli Perintis Presisi berhasil menciptakan kondisi aman dan tertib pada daerah rawan kejahatan.

2. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Patroli Presisi tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan perdamaian dengan cara memberikan himbauan tentang bahaya miras dan dampak negatifnya bagi kesehatan serta keamanan lingkungan. Selain itu, melalui patroli presisi ini masyarakat diminta untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam membantu mengurangi kejahatan yang terjadi di jalanan

dan tindak kriminal di lingkungan sekitar. Masyarakat diajak untuk melaporkan aktivitas mencurigakan, sehingga tercipta kolaborasi antara kepolisian dan warga dalam menjaga keamanan.

3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri

Konsistensi dan ketanggapan dalam pelaksanaan Patroli Presisi berperan penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian. Masyarakat semakin merasa bahwa kehadiran Polri benar-benar ditujukan untuk memberikan perlindungan dari berbagai tindak kriminal. Hal ini tercermin dari hasil survei Charta Politika tahun 2022, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 67,4%, terdiri atas 64,3% responden yang merasa puas dan 3,1% yang sangat puas. Di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga menunjukkan angka positif sebesar 62,4%, yang merupakan gabungan dari 5,80% responden yang sangat percaya dan 56,60% yang percaya.

4. Strategi Patroli Presisi dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Patroli Presisi yang telah membawa dampak positif terhadap rasa aman masyarakat, Polsek turut mengembangkan pendekatan terpadu untuk memperkuat efektivitas upaya pemeliharaan Kamtibmas secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan untuk menjawab tantangan yang lebih kompleks dan dinamis dari kejahatan jalanan maupun sosial, seperti yang diidentifikasi dalam patroli sebelumnya, termasuk pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkotika, dan kekerasan antar kelompok. Strategi yang diterapkan oleh Polsek menggabungkan prinsip Broken Window Theory dan community policing dalam tiga pendekatan utama: preemptif, preventif, dan represif. Pada tahap preemptif, patroli rutin dilaksanakan dua kali sehari di wilayah rawan yang dipetakan berdasarkan data historis dan laporan warga. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan Patroli Presisi dalam membangun kehadiran aktif aparat di tengah masyarakat guna mengurangi potensi tindak kriminal sejak dini.

Dalam pendekatan preventif, unit patroli diperkuat oleh kolaborasi lintas fungsi seperti tim Monitoring dan K9 serta dukungan teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan masyarakat. Upaya ini memperkuat efektivitas Patroli Presisi dengan memfasilitasi deteksi dini dan penanganan cepat terhadap pelanggaran yang berpotensi berkembang menjadi kejahatan serius, seperti miras dan narkoba yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Selain itu, penataan infrastruktur dan keterlibatan warga turut menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan aman.

Ketika kejahatan tidak dapat dicegah dan telah terjadi, strategi represif-investigatif dijalankan melalui penindakan cepat di TKP, mediasi konflik, hingga rehabilitasi pelaku tertentu, misalnya pengguna narkoba. Seluruh proses ini juga sejalan dengan tujuan utama Patroli Presisi, yaitu tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memperkuat kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Dengan adanya forum tripartit, sistem reward-punishment, serta pengembangan database kriminalitas, Polsek terus mengevaluasi dan menyempurnakan strategi berdasarkan capaian di lapangan. Sinergi antara Patroli Presisi dan pendekatan terpadu Polsek ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kajian literatur yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang didapatkan dari uraian pembahasan di atas sebagai berikut:

1. Peran Patroli Presisi dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan

Patroli Presisi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Dari aspek pencegahan hal ini dapat mengidentifikasi titik rawan kejahatan secara lebih akurat, sehingga rute patroli menjadi lebih strategis dan efektif. Kehadiran simbolik aparat kepolisian juga berfungsi dalam menekan niat kejahatan dan dapat memperkuat rasa aman bagi masyarakat. Dari sisi respons cepat, koordinasi yang terintegrasi dan mobilitas tinggi memungkinkan aparat merespons laporan secara cepat, sehingga menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik. Terakhir, pelibatan masyarakat dalam proses pengamanan menciptakan kolaborasi yang kuat antara warga dan aparat, menjadikan keamanan sebagai tanggung jawab bersama.

2. Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan

Peran aktif masyarakat sangat penting dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah digunakan untuk meningkatkan keamanan lingkungan seperti pengawasan dan pelaporan kejadian. Kemudahan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan jika terdapat kejadian yang meresahkan masyarakat sehingga laporan dapat direspon aparat keamanan dengan cepat. Sehingga dengan adanya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan akan menimbulkan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

3. Dampak Adanya Patroli Presisi terhadap Lingkungan dan Masyarakat

- a. Dapat meningkatnya rasa aman dan nyaman pada terhadap lingkungan, karena penerapan patroli pada jam rawan terbukti efektif dalam mengurangi tindak kejahatan dan dapat menciptakan kondisi aman dan tertib pada daerah rawan kejahatan.
- b. Dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan dan perdamaian serta mengajak masyarakat berpartisipasi dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
- c. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri karena pelaksanaan patroli presisi dilakukan secara konsisten dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

4. Strategi patroli presisi dalam meningkatkan keamanan lingkungan

Strategi yang dilakukan oleh patroli presisi menggunakan tiga pendekatan yaitu preemptif, preventif, dan represif. Pendekatan preemptif bertujuan meningkatkan peran aktif aparat di tengah masyarakat guna mengurangi potensi tindak kriminal sejak dini. Pendekatan preventif bertujuan meningkatkan efektivitas dan kecepatan penanganan sebelum berkembang menjadi kejahatan yang serius. Pendekatan represif-investigatif bertujuan untuk menindak kejahatan yang telah terjadi secara cepat di TKP, mediasi konflik, hingga rehabilitasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Tim Patroli Perintis Presisi : Peneliti merekomendasikan untuk melakukan penambahan jumlah anggota patroli dan membaginya menjadi beberapa tim untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi saat melakukan patroli. Serta meningkatkan frekuensi patroli di jam rawan agar dapat menekan tindak kejahatan. Dengan melakukan implementasi rekomendasi tersebut diharapkan tim patroli dapat mencegah tindak kejahatan serta dapat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
2. Bagi Masyarakat : Peneliti merekomendasikan agar masyarakat terus berkolaborasi dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan melakukan implementasi rekomendasi kolaborasi tersebut diharapkan lingkungan menjadi lebih aman dan kondusif sehingga masyarakat tidak khawatir adanya ancaman tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Bidang. (2025, 28 Januari). Patroli Perintis Presisi Ditsamapta Polda Sulteng Tingkatkan Keamanan di Kota Palu. TBNews. <https://tribratanews.sulteng.polri.go.id/2025/01/28/patroli-perintis-presisi-ditsamapta-polda-sulteng-tingkatkan-keamanan-di-kota-palu/>
- Ananda Ridho Sulisty. (2024, September 25). *Profil Tim Patroli Perintis Presisi Polri, Apa Tugas-tugasnya?*
- Anugrah, B., Wisnu, A., & Perkasa, A. P. (2023). *Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan Broken Window Theory*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3). <https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/406>
- Aprilia, A. (2022, Januari 13). Simak Penjelasan Kapolri Soal Tujuan Dibentuknya Tim Patroli Perintis Presisi. From AKURAT.CO: <https://akurat.co/simak-penjelasan-kapolri-soal-tujuan-dibentuknya-tim-patroli-perintis-presisi>
- Bidhumas Polda Metro Jaya. (2024, 8 Agustus). Tim Patroli Perintis Presisi Antisipasi Balap Liar, Tawuran dan Kejahatan Lainnya. TBNews. <https://tribratanews.metro.polri.go.id/tim-patroli-perintis-presisi-antisipasi-balap-liar-tawuran-dan-kejahatan-lainnya/>
- Bondan Anugrah, Arsenius Wisnu, & Aji Patria Perkasa. (2023). Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan Broken Window Theory. *Ilmu Kepolisian*.
- DetikNews. (2024). *Inovasi teknologi dalam pengawasan keamanan oleh Polsek*. <https://www.detik.com>
- Firmansyah, W. (2024, November 2). *Aipda Ambarita posting penangkapan 4 begal yang meresahkan di Jatiasih Bekasi*. iNews Bekasi. <https://bekasi.inews.id/read/515050/aipda-ambarita-posting-penangkapan-4-begal-yang-meresahkan-di-jatiasih-bekasi>
- H. Burhanuddin, S. H. , M. Hum. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo). *Serambi Hukum*, 11.
- Karana, W. A. J., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2024). Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 510–526. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3232>
- Kutina. (2025, Maret). Patroli Dit Samapta Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat

- Terhadap Balap Liar di Kota Gorontalo. TBNews. <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/75913/patroli-dit-samapta-tindak-lanjut-keluhan-masyarakat-terhadap-balap-liar-di-kota-gorontalo/>
- Mardiyanta, A. (n.d.). *State of the art: Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik State of the art: Participation concept in public administration*.
- Mariana Cerca, Amanda Sosa, Egle Gusciute, & Fionnuala Murphy. (2022). *Strategic planning of bio-based supply chains: Unlocking bottlenecks and incorporating social sustainability into biorefinery systems*.
- OpenLearn. (2019, Januari 24). What is crime? From OpenLearn: <https://www.open.edu/openlearn/society-politics-law/criminology/what-crime>
- Santo. (2024, June 18). *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik*.
- Saputra, A., Sutrasno, D., Setiawan, W., Suyanto, J., Puslitbang Polri, K., Puslitbang Polri, K., Puslitbang Polri, K., & Madya Brin, P. (n.d.). *Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Bagi Pembangunan Nasional Tahun 2022*.
- Siahaan, A. P., Chairani, D. C., & Pradana, M. A. (2024). Pengembangan Penguatan Keamanan Lingkungan Melalui Digitalisasi dan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sambirejo Timur). *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.313>
- Skogan, W. G. (2006). *Police and community in Chicago: A tale of three cities*. Oxford University Press.
- Th39eneration. (2024). Patroli Perintis Presisi Samapta Polda Gorontalo Cegah Peredaran Miras Di Warung Warga. TBNews. <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/72800/patroli-perintis-presisi-samapta-polda-gorontalo-cegah-peredaran-miras-di-warung-warga/>
- Tribratanews.polri.go.id. (2023, Maret 28). Kapolda Metro Jaya : Tim Patroli Perintis Presisi Adalah Garda Depan Cegah Kejahatan. From Tribratanews.polri.go.id: <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolda-metro-jaya-tim-patroli-perintis-presisi-adalah-garda-depan-cegah-kejahatan-21110>
- Utama, J. D. (2019). Peran Komunikasi Direktorat Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Ditsabha Polda Kalteng) Dalam Peningkatan Patroli Dialogis Di Kota
- Wahyu Trisno Aji, & Mohammad Solekhan. (2024). Kebijakan Publik Indonesia (Studi pada Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan BBM Subsidi Tahun 2024). *Innovation in Education*, 2.
- Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken windows: The police and neighborhood safety. *The Atlantic Monthly*, 249(3), 29–38. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>
- Yulianti T, Hariyanti Hamid, & Saifullah. (n.d.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan Dan Penyuluhan Sistem Keamanan Lingkungan Di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*.
- Yurensi Laary, F.M.G. Tulusan, & Salmin Dengo. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban DesaBaruKecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Administrasi Publik*, VII, 60–67.